

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMBINAAN PETUGAS HUMAS DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG

BANUARA NADEAK

banuaranadeak@gmail.com

FEB UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl H.S Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Di era globalisasi perkembangan teknologi semakin berkembang, berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan dunia semakin sempit dan batas-batas negara semakin kabur. Namun, dilain pihak masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan sebagai dampak dari informasi yang semakin transparan. Kondisi ini membentuk kecenderungan baru yaitu pentingnya komunikasi (communication). Oleh karena itu, masalah komunikasi adalah masalah penting yang dewasa ini dihadapi oleh lembaga-lembaga bisnis dan ekonomi maupun lembaga pemerintah. Berbagai usaha digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan suatu komunikasi dan hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang terkait. Mewujudkan profesionalisme bagian humas yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi pembangunan yang seimbang menjadi tujuan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis SWOT dan metode subyektif dengan pembobotan skala likert (1-5) sehingga diperoleh peta kekuatan organisasi yang terletak di kuadran I yaitu optimalkan komitmen good governance dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang menginteraksikan antara kekuatan dan peluang yang dianggap mampu dalam meningkatkan kinerja pembinaan petugas humas dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.

Kata kunci : Humas, Informasi, Komunikasi

PENDAHULUAN

Sejalan dengan kondisi negara saat ini yang terus bergulir adanya reformasi demokrasi dalam segala bidang dengan tujuan agar kehendak masyarakat dapat tertampung dan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Tuntutan kearah yang lebih demokratis dan lebih baik menuju masyarakat yang madani sebagai harapan seluruh masyarakat Indonesia yang mengakibatkan timbulnya kebebasan mengeluarkan pendapat (*Public Opinion*).

Dalam mewujudkan kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut, banyak langkah dan cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia dimana salah satunya adalah melalui media massa (pers). Hal ini didukung dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap pencabutan atau penghapusan SIUP bagi dunia penerbitan atau media massa. Sehingga muncullah berbagai majalah, baik harian, mingguan, maupun bulanan yang dengan bebasnya telah menampung aspirasi dan pendapat masyarakat untuk menyampaikan kritikan, saran dan bahkan hujatan, seperti : pembatasan kebebasan pers dan sebagainya.

Setiap individu dan lembaga akan melakukan interaksi dengan lainnya. Dalam interaksinya tersebut muncul berbagai masalah, misalnya terjadi salah pengertian (*misunderstanding*) atau salah pengertian (*misinterpretation*) terhadap pesan atau informasi yang diberikan. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada setiap pemberitaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang preventif, sehingga pemberitaan terutama yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berakitan dengan pemerintah daerah tidak akan disalah artikan oleh mereka yang membaca atau mendengarkan berita yang dimaksud.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan profesionalisme bagian humas yang efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi pembangunan yang berimbang dengan sasaran meningkatnya kualitas petugas humas dalam penyebarluasan informasi.

METODE PENELITIAN

Pemilihan dan penetapan faktor kunci keberhasilan dengan menggunakan penilaian faktor internal dan eksternal. Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor kunci keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci atau faktor strategis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor menggunakan metode subyektif yaitu suatu metode untuk menentukan urgensi / tingkat kepentingan satu faktor tanpa membandingkan faktor satu dengan faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala likert (1-5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor disajikan dalam matriks berikut:

Tabel 1. Matriks Urgensi Faktor Internal

STRENGTH	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Adanya komitmen Good Governance	5	$5 / 25 \times 100\% = 20 \%$
Terbukanya akses informasi ke bagian humas	5	$5 / 25 \times 100\% = 20 \%$
Adanya program kehumasan yang jelas	5	$5 / 25 \times 100\% = 20 \%$
WEAKNESS		
Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat	3	$3 / 25 \times 100\% = 12 \%$
Kurang dikuasanya pola-pola kehumasan yang efektif	5	$5 / 25 \times 100\% = 20 \%$
Kurangnya sarana pendukung kehumasan	2	$2 / 25 \times 100\% = 8 \%$
JUMLAH	25	100 %

Tabel 2. Matriks Urgensi Faktor Eksternal

OPPORTUNITY	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Perkembangan teknologi informasi	5	$5 / 22 \times 100\% = 23 \%$
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima	4	$4 / 25 \times 100\% = 18 \%$
Makin kritisnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah	4	$4 / 25 \times 100\% = 18 \%$
THREATS		
Adanya pembatasan UU penyiaran	3	$3 / 25 \times 100\% = 12 \%$
Globalisasi dan imperialisme terhadap budaya Indonesia	5	$5 / 25 \times 100\% = 20 \%$
Intervensi kepentingan golongan tertentu dalam kehumasan	2	$2 / 25 \times 100\% = 8 \%$
JUMLAH	22	100 %

Langkah selanjutnya setelah dilakukan penilaian urgensi faktor adalah melakukan evaluasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

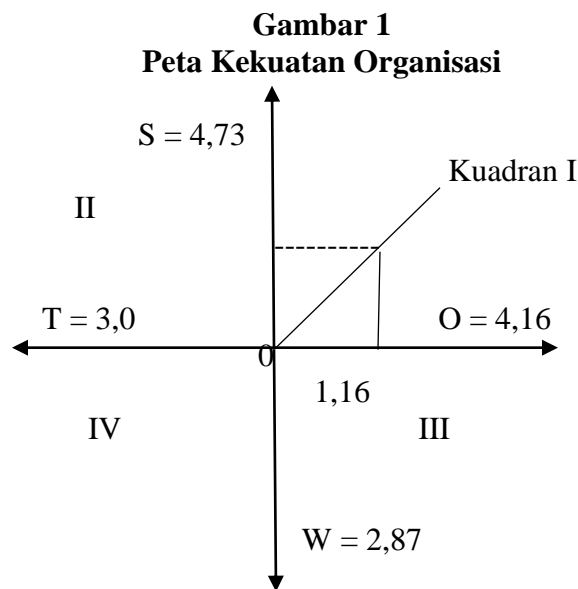
No	Faktor Internal & Eksternal	NU	BF%	ND	NBD	NILAI KETERTARIKAN												NRK	NBK	TNB	FKK
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
INTERNAL																					
Strength																					
1	Adanya program kehumasan yang jelas	5	20,0	5	1,00	3	3	5	4	2	2	0	2	1	1	1	2,18	0,44	1,44		
2	Adanya komitmen Good Governance	5	20,0	5	1,00	3	4	2	2	5	5	2	4	5	2	2	3,27	0,65	1,65	1	
3	Terbukanya akses informasi ke Bagian Humas	5	20,0	5	1,00	3	4	4	4	3	5	3	2	2	3	3,18	0,64	1,64	2		
Weaknesses																					
4	Kurang dikuasainya pola-pola kehumasan yang efektif	3	12,0	3	0,36	5	2	4	4	4	5	2	1	3	3	2	3,09	0,37	0,73	2	
5	Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat	5	20,0	5	1,00	4	2	4	4	4	2	4	2	2	4	2	3,09	0,62	1,62	1	
6	Kurangnya sarana pendukung kehumasan	2	8,0	3	0,24	2	5	3	5	4	4	4	3	4	3	2	3,55	0,28	0,52		
2,87																					
EKSTERNAL																					
Opportunities																					
7	Perkembangan teknologi informasi	5	23	4	0,91	2	5	5	2	2	4	3	2	4	4	2	3,18	0,72	1,63	1	
8	Tuntutan masyarakat	4	18	4	0,73	0	2	3	1	4	4	3	3	3	4	3	2,73	0,50	1,22		

9	terhadap pelayanan prima Makin kritisnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah	4	18	4	0,73	2	4	2	3	2	3	2	3	3	5	4	5	3,18	0,58	1,31	2
Threats																					
10	Intervensi kepentingan golongan tertentu dalam kehumasan	3	14	4	0,55	1	5	2	3	2	4	4	3	5	4	4	3,36	0,46	1	2	
11	Adanya pembatasan UU Penyiaran	4	18	5	0,91	1	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	3,09	0,56	1,47	1	
12	Globalisasi dan imprelialisme terhadap budaya indonesia	2	9	3	0,27	1	2	3	3	2	2	2	3	5	4	4	2,82	0,26	0,53	2	
3,0																					

Berdasarkan besarnya TNB (Total Nilai Bobot) tiap aktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai misi. Penentuan dengan peta posisi kekuatan organisasi, maka berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari SWOT adalah :

- Strengths : Adanya komitmen Good Governance
- Weaknesses : Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat
- Opportunities : Perkembangan teknologi informasi
- Threats : Adanya pembatasan UU Penyiaran

Berdasarkan Total Nilai Bobot (TNB) semua faktor, maka dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi seperti gambar berikut :



Perumusan tujuan berdasarkan kemampuan organisasi adalah merupakan prinsip utama manajemen, sebagaimana tercermin dalam Salusu J (2003:6-7) mengemukakan dengan analisis

faktor-faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, tantangan sangat berguna dalam merumuskan alternatif-alternatif tujuan, dan akan memudahkan para pengambil keputusan. Vincent Gaspersz (2002:20) mengemukakan agar kesempatan-kesempatan strategis yang teridentifikasi dari hasil analisis lingkungan eksternal dapat dikembangkan menjadi sasaran strategis yang relevan. Perumusan tujuan berdasar kemampuan organisasi adalah merupakan prinsip utama manajemen, yakni mencapai hasil dengan memberdayakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip ini tercermin dalam pemikiran beberapa ahli dalam memilih alternatif terbaik. Salusu menyatakan rumusan dan pilih yang apa yang paling baik diraih sesuai dengan kemampuan unit kerja anda. Goerge A. Steiner, seorang ahli strategi mengemukakan bahwa rumusan tujuan harus terkait dengan misi dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Prinsip utama manajemen diatas dan belajar dari pengalaman keberhasilan masa lalu dalam mencapai hasil, cara yang paling tepat dalam perumusan tujuan yang rasional, logis dicapai, adalah berdasarkan kemampuan organisasi yang tercermin dalam faktor-faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan. Dengan mengoptimalkan kekuatan (strengths) kunci dan memanfaatkan dukungan peluang (opportunities) kunci organisasi yang berada pada posisi kwadran I dapat diproyeksikan suatu keadaan masa depan yang lebih baik, sesuai dengan bidang misi yang dijalankan.

Dari hasil perumusan tujuan dengan kekuatan kunci adanya komitmen Good Governance dan terbukanya akses informasi ke bagian humas dengan peluang kunci perkembangan teknologi informasi dan makin kritisnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah didapatkan bahwa Faktor Kunci Keberhasilan (FFK). FKK-1 diperoleh alternatif tujuan *Mewujudkan Profesionalisme bagian Humas yang Efektif dan Efisien dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang Berimbang* dan FKK-2 diperoleh alternatif tujuan Meningkatkan Efektifitas Program Pengembangan SDM Auditor. Setelah tujuan dirumuskan dan divalidasi kesesuaiannya dengan misi dan tugasnya, dilanjutkan dengan penentuan atau pemilihan alternatif yang terbaik berdasarkan nilai **Manfaatnya** (M) bagi publik, dan nilai **Kemampuan Mengatasi Kelemahan** (KML) dan **Kemampuan Mengatasi Ancaman** (KMA) yang diperkirakan dapat menghambat pencapaian tujuan. Penetapan kolom M, KML dan KMA tergantung dari peta kekuatan yang diperoleh dari hasil evaluasi Faktor Internal (FI) dan Faktor Eksternal (FE). Penilaian dapat dilakukan dengan memakai skala nilai 1-5

Angka 5 artinya sangat mudah mengatasi kelemahan kunci/ancaman kunci atau sangat mudah memanfaatkan kekuatan kunci/peluang kunci.

Angka 4 artinya mudah mengatasi kelemahan kunci/ancaman kunci atau mudah memanfaatkan kekuatan keunci/peluang kunci

Angka 3 artinya cukup mudah mengatasi kelemahan kunci/ancaman kunci atau cukup mudah memanfaatkan kekuatan kunci/peluang kunci

Angka 2 artinya sulit mengatasi kelemahan kunci/ancaman kunci atau sulit memanfaatkan kekuatan kunci/peluang kunci

Angka 1 artinya sangat sulit mengatasi kelemahan kunci/ancaman kunci atau sangat sulit memanfaatkan kekuatan kunci/peluang kunci

Pemilihan atau penentuan tujuan berdasarkan :

- 1) Total Nilai (TN) yang paling besar
- 2) Kalau TN sama dipilih yang paling besar manfaatnya bagi publik

Dari dua alternatif tujuan yang memiliki Total Nilai (TN) tertinggi adalah *Mewujudkan Profesionalisme Bagian Humas yang Efektif dan Efisien dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang Berimbang*. Penyusunan sasaran tujuan organisasi (*organization goals*) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan suatu rumusan keinginan yang hendak dicapai dalam waktu yang akan datang. Tujuan yang dirumuskan tersebut disesuaikan dengan rencana strategik jangka panjang instansi. Sebaiknya jangka waktunya disesuaikan dengan masa pengabdian suatu pemerintah yakni lima tahun. Pencapaian tujuan jangka panjang itu bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu tujuan dijabarkan kedalam sasaran tahunan. Sasaran organisasi (*organization objectives*) adalah suatu pernyataan hasil riil yang terukur, yang dapat dicapai dalam waktu antara 1 – 12 bulan (sebagai tujuan jangka pendek).

Cara yang paling tepat dalam merumuskan tujuan yang rasional, logis dicapai adalah berdasarkan kemampuan organisasi. Gambaran kemampuan organisasi itu dapat dilihat berdasarkan faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan organisasi. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi dimasa lalu, dapat diproyeksikan keberhasilan pada masa yang akan datang.

1. Perumusan dan Penetapan Strategi

Strategi adalah seni memadukan atau menginteraksikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran, kinerja adalah dengan strategi memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Penyusunan strategi dapat dilakukan dengan memakai analisis kesenjangan, pendekatan strategi matriks umum, strategi matrik BCG (Boston Consulting Group). Penyusunan strategi dengan pendekatan formulasi strategi matriks SWOT adalah berdasar pada prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan organisasi atau faktor-faktor kunci keberhasilan. Caranya adalah dengan memadukan, atau mengintegrasikan, menginteraksikan antar kekuatan kunci keberhasilan, agar tercipta kesatuan arah dan sinergi dalam mencapai tujuan. Beberapa ahli menganggap, ada empat strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

- 1) Strategi Ekspansi dirumuskan pada kuadran I
- 2) Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II
- 3) Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III
- 4) Strategi devensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam diagram berikut :

Tabel 4. Formulasi Strategi SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	S 1. Adanya komitmen Good Governance 2. Terbukanya akses informasi ke Bagian Humas	W 1. Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat 2. Kurang dikuasainya pola-pola kehumasan yang efektif
1. Perkembangan teknologi informasi	Strategi SO 1. Optimalkan komitmen Good Governance dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi	Strategi W 1. Tingkatkan inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
2. Makin kritisnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah	2. Optimalkan pola-pola kehumasan yang mampu menumbuhkan simpati dan partisipasi masyarakat	2. Tingkatkan pola-pola kehumasan yang efektif dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat
1. Adanya pembatasan UU penyiaran	Strategi ST 1. Dayagunakan adanya komitmen Good Governance untuk mengantisipasi adanya pembatasan UU penyiaran	Strategi WT 1. Tingkatkan inisiatif dalam menyampaikan ide dan pendapat guna mengantisipasi adanya pembatasan UU penyiaran
2. Intervensi kepentingan golongan tertentu dalam kehumasan	2. Dayagunakan terbukanya akses informasi ke bagian humas untuk mengatasi intervensi kepentingan golongan tertentu dalam kehumasan	2. Tingkatkan pola-pola kehumasan yang efektif guna menangkal intervensi kepentingan golongan tertentu dalam kehumasan

Pemilihan strategi dapat dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Strategi fokus, artinya dipilih alternatif yang berada pada kuadran yang sama dengan lokus tujuan yang akan dicapai yakni pada peta kekuatan organisasi.
- 2) Strategi gabungan, atau strategy mix, atau strategi multi, artinya ada empat strategi yang dilakukan secara simultan yakni dengan memilih satu strategi dari tiap kuadran yang saling terkait atau yang mendukung strategi utama atau fokus.

Dasar penentuan atau pemilihan alternatif strategi adalah strategi yang paling efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dan yang paling murah biayanya, serta paling

praktis pelaksanaannya. Dalam menentukan yang terbaik dari strategi, dapat diterapkan teori Tapisan, yakni berdasarkan tiga kriteria berikut :

- 1) Efektivitasnya dalam mencapai sasaran (efektivitas)
- 2) Sumber daya yang digunakan paling efisien (biaya)
- 3) Kepraktisan dalam melaksanakannya (kemudahan)

Berdasarkan jumlah masing-masing strategi, maka dipilih yang paling tinggi nilainya yaitu Optimalkan Komitmen Good Governance Dengan Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Untuk menjamin strategi terlaksananya dengan baik dalam mencapai sasaran kinerja, maka perlu disusun suatu kebijakan operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan operasional merupakan acuan, pedoman yang memberikan arah program, kegiatan yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

3. Rencana pelaksanaan kegiatan

Dalam menyusun rencana kegiatan dapat digunakan matriks rencana kegiatan. Dalam matriks rencana kegiatan seyogyanya mencakup *apa* tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta indikatornya, *bagaimana* cara mencapainya (yakni dengan strategi atau program dan rencana kegiatan yang tepat dilakukan), *siapa* yang akan diberi tanggung jawab melaksanakan (adalah orang yang memiliki kompetensi yang tepat dan bermotivasi tinggi) dan *kapan waktu* pelaksanaan (mulai dan selesai) serta *berapa anggaran* yang diperlukan.

4. Rencana monitoring dan evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang ada.

KESIMPULAN

1. Melalui rumusan masalah diperoleh hambatan dan kelemahan, antara lain :
 - Kurangnya inisiatif dalam penyampaian ide dan pendapat
 - Kurangnya sarana dan prasarana
 - Rendahnya kualitas SDM
2. Dengan analisis SWOT diperoleh peta kekuatan organisasi yang terletak di kuadran I yaitu *Optimalkan komitmen Good Governance dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi* yang menginteraksikan antara kekuatan dan peluang yang dianggap mampu dalam meningkatkan kinerja pembinaan petugas humas dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, dkk, 2003, Kertas Kerja Perseorangan (KKP), Bahan Ajar Diklat
Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2006, Lembaga Administrasi Negara
– Republik Indonesia 2001.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/X/6/Y/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (LAKIP)
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Karawang
- Rencana Strategis Sekretariat Daerah kabupaten Karawang
- Sianipar, dkk, 2003, Teknik Analisis Manajemen (TAM), Bahan Ajar Diklat
Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2006, Lembaga Administrasi Negara
– Republik Indonesia 2003.